

PERAN BIAYA PUBLIK, TATA KELOLA PEMERINTAH DAN SISTEM ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI JABODETABEK

Hurian Kamela¹, Dede Puspa Pujia², Adibah Yahya³, Kiko Armenita Julito⁴

Universitas Terbuka¹

Universitas Tangerang Raya²

Universitas Pelita Bangsa³

Universitas 17 Agustus Jakarta⁴

hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id^{1*}, dede.puspa@untara.ac.id², adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id³,

kiko.julito@uta45jakarta.ac.id⁴

Abstract

This study analyses the influence of public expenditure, government governance, and the government budgeting system on community satisfaction in the Jabodetabek region. Community satisfaction is an important indicator of public sector performance, particularly in relation to accountability and transparency in public financial management. The research employs a quantitative, survey-based approach. The population consists of residents in the Jabodetabek area, with 164 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using structured questionnaires and analysed using descriptive statistics and multiple linear regression analysis to test the proposed hypotheses. The results show that public expenditure has a positive and significant effect on community satisfaction, indicating that effective and efficient use of public funds improves public perceptions of government performance. Government governance also has a positive, significant influence on community satisfaction, underscoring the importance of transparency, accountability, and public participation in governance processes. In addition, the government budgeting system significantly affects community satisfaction, reflecting the role of proper budget planning, allocation, and implementation in meeting public needs. This study provides empirical evidence on the integrated roles of public expenditure, governance, and budgeting systems in shaping community satisfaction, offering policymakers valuable insights to improve public financial management and the quality of public services.

Keywords: *Budgeting System, Community Satisfaction, Government Governance, Public Expenditure, Public Financial Management*

Abstrak

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting kinerja sektor publik, khususnya dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei. Populasi penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, dengan jumlah sampel sebanyak 164 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang mengindikasikan bahwa penggunaan dana publik yang efektif dan efisien dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tata kelola pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Selain itu, sistem anggaran pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat,

yang mencerminkan peran perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran yang tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai peran terintegrasi pengeluaran publik, tata kelola, dan sistem anggaran dalam membentuk kepuasan masyarakat, serta memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Sistem Anggaran, Kepuasan Masyarakat, Tata Kelola Pemerintah, Pengeluaran Publik, Pengelolaan Keuangan Publik.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor publik tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengelolaan keuangan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik semakin meningkat, khususnya di wilayah perkotaan dan metropolitan. Pemerintah tidak hanya dinilai dari kemampuan menyerap anggaran, tetapi juga dari sejauh mana penggunaan anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan publik (OECD, 2023).

Biaya publik merupakan salah satu elemen utama pada akuntansi sektor publik yang mencerminkan pengorbanan sumber daya pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Efektivitas pengelolaan biaya publik menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan fiskal daerah, karena biaya yang tidak efisien berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pengendalian biaya publik yang baik berhubungan positif dengan peningkatan persepsi nilai layanan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Chan & Gao, 2021; Andrews et al., 2022). Selain biaya publik, tata kelola pemerintah (*good governance*) memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Tata kelola yang baik mendorong keterbukaan informasi anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi

empiris terbaru menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, khususnya pada pemerintahan daerah perkotaan (Hood & Dixon, 2020; Mardiasmo, 2021).

Sistem anggaran pemerintah juga merupakan instrumen penting dalam manajemen keuangan publik karena berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Perkembangan sistem anggaran modern menekankan pada pendekatan anggaran berbasis kinerja yang mengaitkan alokasi dana dengan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sistem anggaran yang efektif dan terintegrasi dengan indikator kinerja mampu meningkatkan efisiensi belanja publik dan kualitas layanan pemerintah daerah (Robinson, 2020; Schick, 2022).

Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik. Tingkat kepuasan mencerminkan kesesuaian antara harapan masyarakat dan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Laporan dan kajian internasional terbaru menegaskan bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran, transparansi penggunaan dana publik, serta tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan warga (OECD, 2023; Van de Walle, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kepuasan masyarakat dari perspektif kualitas layanan atau transparansi anggaran, kajian yang mengintegrasikan biaya publik, tata kelola pemerintah, dan

sistem anggaran secara simultan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan variabel-variabel tersebut secara parsial, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai faktor-faktor keuangan dan kelembagaan yang memengaruhi kepuasan masyarakat secara komprehensif (Andrews et al., 2022; Kim & Park, 2023).

Wilayah Jabodetabek dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kawasan metropolitan dengan tingkat kompleksitas administrasi, kepadatan penduduk, dan alokasi anggaran publik yang tinggi. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah di wilayah ini menjadikan Jabodetabek sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji hubungan antara biaya publik, tata kelola pemerintah, sistem anggaran, dan kepuasan masyarakat. Selain itu, disparitas kualitas layanan antar daerah di Jabodetabek menunjukkan perlunya evaluasi empiris terhadap efektivitas pengelolaan keuangan publik (Bappenas, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran pemerintah terhadap kepuasan masyarakat di Jabodetabek. Penelitian ini menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial serta pengaruhnya secara simultan menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menyempurnakan sistem anggaran agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan fiskal daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat (OECD,

2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif akuntansi biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan kepuasan masyarakat di wilayah metropolitan. Dengan menggunakan konteks Jabodetabek, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan administrasi publik, sekaligus memberikan kontribusi empiris terbaru yang relevan dengan tantangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepuasan Masyarakat (*Citizen Satisfaction Theory*)

Penelitian ini didasarkan pada Teori Kepuasan Masyarakat (*Citizen Satisfaction Theory*) yang menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat terbentuk dari perbandingan antara harapan masyarakat dengan kinerja aktual pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Konteks sektor publik, kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi warga. Studi terkini menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, transparansi kebijakan, dan manfaat pengeluaran publik sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah (Kim, Rho, & Teo, 2024). Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menjelaskan hubungan antara biaya publik, tata kelola, dan sistem anggaran dengan kepuasan masyarakat.

Peran Biaya Publik

Biaya publik merupakan seluruh pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk menyediakan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Konteks pemerintahan daerah, biaya publik menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan administrasi. Pengelolaan biaya publik yang tepat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi distribusi dan alokasi sumber daya secara adil. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa belanja publik yang diarahkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Dosinta, Djafar, & Yantiana, 2024).

Peran biaya publik juga terlihat dari bagaimana pemerintah menetapkan prioritas kebijakan dalam sistem anggaran daerah. Alokasi biaya publik yang proporsional pada sektor-sektor strategis akan menghasilkan output pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal dan belanja pelayanan publik, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat (Kurnia, Hidayat, & Nugraha, 2021). Oleh karena itu, biaya publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menerjemahkan kebijakan publik ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain aspek alokasi, efektivitas biaya publik sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan realisasi anggaran. Biaya publik yang direncanakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan tingkat kepuasan publik. Pada era digital, pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada penguatan teknologi dan digitalisasi layanan publik terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan transparansi layanan, sehingga berdampak positif pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Zein, Fayyaza, & Sipahutar, 2024).

Biaya publik memiliki keterkaitan erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan biaya publik yang

transparan dan akuntabel memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik. Penelitian terkini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan biaya publik yang didukung oleh akuntabilitas dan pengawasan yang baik dapat meningkatkan legitimasi pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Sina, 2025).

Berdasarkan konteks wilayah Jabodetabek yang memiliki karakteristik masyarakat urban dengan ekspektasi layanan yang tinggi, peran biaya publik menjadi semakin strategis. Ketepatan alokasi dan efisiensi penggunaan biaya publik akan sangat menentukan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat menilai bahwa biaya publik digunakan secara optimal, adil, dan berdampak langsung pada peningkatan layanan, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Oleh karena itu, biaya publik menjadi variabel penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan variasi kepuasan masyarakat di wilayah Jabodetabek (Dosinta et al., 2024; Kurnia et al., 2021), sehingga hipotesis:

H1= Peran biaya publik berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat di Jabodetabek

Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintah (government governance) merupakan seperangkat mekanisme, proses, dan institusi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya publik serta menjalankan kewenangan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Tata kelola pemerintah yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik

dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021; Setyaningrum & Wardhani, 2020). Berdasarkan konteks pemerintahan daerah, tata kelola pemerintah menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa kebijakan publik dan program pembangunan dijalankan secara efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki tata kelola yang baik mampu mengelola anggaran, kebijakan, serta pelayanan publik secara lebih responsif dan berorientasi pada hasil. Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah dan tingkat kepuasan terhadap layanan publik yang diberikan (Sofyani, Pramita, & Saleh, 2022).

Tata kelola pemerintah juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik. Penelitian terbaru menemukan bahwa tata kelola keuangan yang baik mampu menekan praktik inefisiensi dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, yang pada akhirnya berdampak positif pada kepuasan masyarakat (Putri & Rahayu, 2023).

Selain itu, penerapan tata kelola pemerintah yang baik mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan riil warga serta meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Penelitian pada pemerintah daerah perkotaan menunjukkan bahwa partisipasi publik yang difasilitasi melalui tata kelola yang inklusif berkontribusi positif terhadap kualitas kebijakan dan tingkat kepuasan masyarakat

(Rahman & Nugroho, 2021). Wilayah Jabodetabek yang memiliki kompleksitas tata kelola tinggi akibat kepadatan penduduk dan dinamika sosial ekonomi yang beragam, tata kelola pemerintah menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik. Pemerintah daerah yang mampu menerapkan tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel akan lebih mampu memenuhi ekspektasi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintah dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel penting yang memengaruhi kepuasan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kualitas pengelolaan biaya publik dan sistem anggaran pemerintah (Sofyani et al., 2022; Putri & Rahayu, 2023), sehingga hipotesis:

H2= Tata Kelola Pemerintah berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat di Jabodetabek

Sistem Anggaran Pemerintah

Sistem anggaran pemerintah merupakan mekanisme formal yang digunakan pemerintah dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan publik untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam sektor publik, sistem anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan dan komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sistem anggaran yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengeluaran publik dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat (Sofyani & Akbar, 2020). Praktik pemerintahan daerah, sistem anggaran pemerintah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk

mengaitkan alokasi anggaran dengan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dapat meningkatkan efisiensi belanja daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik (Pratolo, Sari, & Nugrahanti, 2021).

Selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian, sistem anggaran pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Anggaran yang disusun secara terbuka dan mudah dipahami memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Penelitian terbaru menemukan bahwa keterbukaan sistem anggaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat, karena masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang memadai mengenai kebijakan fiskal pemerintah daerah (Ritonga, Adhikari, & Taufiq, 2022). Sistem anggaran pemerintah juga memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Anggaran yang disusun tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Sebaliknya, sistem anggaran yang terintegrasi dengan prinsip *good governance* mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memastikan bahwa belanja pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian di pemerintah daerah perkotaan menunjukkan bahwa kualitas sistem anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik dan kepuasan masyarakat (Sari & Putri, 2023). Konteks wilayah Jabodetabek yang memiliki kompleksitas kebutuhan masyarakat dan tekanan pelayanan publik yang tinggi, sistem anggaran pemerintah menjadi faktor strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan layanan publik. Ketepatan perencanaan, keadilan alokasi, serta efektivitas pelaksanaan anggaran akan memengaruhi sejauh mana

masyarakat merasakan manfaat dari program pemerintah. Oleh karena itu, sistem anggaran pemerintah dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel penting yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui efektivitas biaya publik dan kualitas tata kelola pemerintah (Ritonga et al., 2022; Sari & Putri, 2023), sehingga hipotesis:

H3= Sistem Anggaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat di Jabodetabek

Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan tingkat penilaian atau persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diterima dibandingkan dengan harapan. Berdasarkan sektor publik, kepuasan masyarakat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Penelitian terkini menegaskan bahwa kepuasan masyarakat mencerminkan sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menjawab kebutuhan serta ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik (Rinaldi & Sari, 2021). Berdasarkan konteks pemerintahan daerah, kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan secara langsung, tetapi juga oleh proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah. Masyarakat cenderung merasa puas apabila pemerintah mampu memberikan informasi yang jelas, pelayanan yang cepat, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Studi empiris menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (Sofyani, Pramita, & Saleh, 2022).

Kepuasan masyarakat juga berkaitan erat dengan pengelolaan biaya publik dan sistem anggaran pemerintah. Alokasi dan

penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik serta keterbukaan dalam pengelolaan anggaran berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diterima (Ritonga, Adhikari, & Taufiq, 2022). Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan publik turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Pelayanan berbasis digital dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Studi pada pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi layanan publik berbasis teknologi berkontribusi positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, terutama pada daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi seperti wilayah Jabodetabek (Putri & Rahayu, 2023). Berdasarkan konteks wilayah Jabodetabek yang memiliki karakteristik masyarakat urban dengan tingkat pendidikan dan ekspektasi layanan yang relatif tinggi, kepuasan masyarakat menjadi indikator strategis untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Kepuasan masyarakat tidak hanya mencerminkan kualitas layanan yang dirasakan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kepuasan masyarakat diposisikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh peran biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Sofyani et al., 2022; Ritonga et al., 2022).

Rumusan Penelitian

$$KM_{it} = a_{it} + PB_{it} + TK_{it} + SA_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

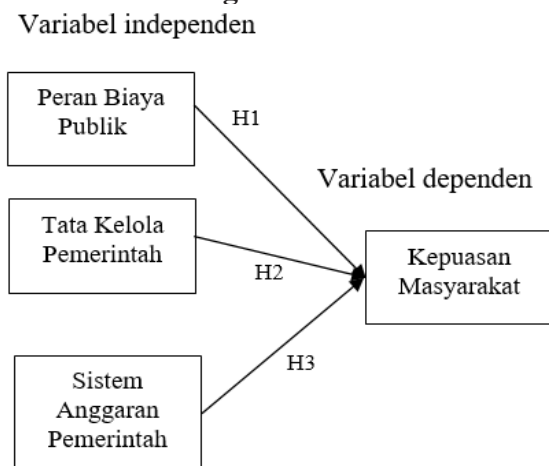
KM_{it} = Kepuasan Masyarakat

PB_{it} = Peran Biaya Publik

TK_{it} = Tata Kelola Pemerintah

SA_{it} = Sistem Anggaran

Gambar 1
Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah penulis (2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran pemerintah terhadap kepuasan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Metode survei digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan desain penelitian cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu (Desember 2025) untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik.

Populasi penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan pernah menggunakan layanan publik pemerintah daerah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden berusia minimal 17 tahun dan memiliki pengalaman langsung dalam mengakses layanan publik. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 125 responden, yang dinilai telah memenuhi

kecukupan sampel untuk analisis statistik multivariat dan representatif terhadap populasi penelitian.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur variabel biaya publik, tata kelola pemerintah, sistem anggaran pemerintah, dan kepuasan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, serta literatur ilmiah yang relevan guna memperkuat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Model penelitian ini menguji pengaruh langsung biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran pemerintah sebagai variabel independen terhadap kepuasan masyarakat sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen serta uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model analisis. Hasil analisis digunakan untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antarvariabel serta menjelaskan implikasinya terhadap peningkatan kepuasan masyarakat di wilayah Jabodetabek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Uji Validitas X1
(Variabel Peran Biaya Publik)**

No.	Item	r-count	r-tab	Sign.
1	X1.1	0.612	0.153	Valid
2	X1.2	0.684	0.153	Valid
3	X1.3	0.597	0.153	Valid
4	X1.4	0.721	0.153	Valid
5	X1.5	0.655	0.153	Valid

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 1 menjelaskan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Peran Biaya Publik (X1), yaitu item X1.1 sampai dengan X1.5, memiliki

nilai *r-count* yang lebih besar daripada *r-tab* sebesar 0,153. Nilai *r-count* berkisar antara 0,597 hingga 0,721. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X1 dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Tabel 2 Uji Validitas X2
(Variabel Tata Kelola Pemerintah)**

No.	Item	r-count	r-tab	Sign.
1		0.703	0.153	Valid
2	X2.1			
2	X2.2	0.689	0.153	Valid
3	X2.3	0.742	0.153	Valid
4	X2.4	0.671	0.153	Valid
5	X2.5	0.718	0.153	Valid

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 2 menjelaskan hasil uji validitas variabel Tata Kelola Pemerintah (X2) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan, yaitu X2.1 sampai dengan X2.5, memiliki nilai *r-count* yang lebih besar dari *r-tab* sebesar 0,153. Nilai *r-count* berada pada rentang 0,671 hingga 0,742. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan pada variabel X2 dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 3 Uji Validitas X3
(Variabel Sistem Anggaran Pemerintah)**

No.	Item	r-count	r-tab	Sign.
1	X3.1	0.658	0.153	Valid
2	X3.2	0.701	0.153	Valid
3	X3.3	0.734	0.153	Valid
4	X3.4	0.692	0.153	Valid
5	X3.5	0.665	0.153	Valid

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 3 menjelaskan hasil uji validitas terhadap variabel Sistem Anggaran Pemerintah (X3) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan, yaitu X3.1 sampai dengan X3.5, memiliki nilai *r-count* yang lebih besar daripada *r-tab* sebesar 0,153. Nilai *r-count* berada pada rentang 0,658 hingga 0,734. Dengan demikian, seluruh item pernyataan pada variabel X3 dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Tabel 4 Uji Validitas Y
(Variabel Kepuasan Masyarakat)**

No.	Item	r-count	r-tab	Sign.
1	Y.1	0.728	0.153	Valid
2	Y.2	0.751	0.153	Valid
3	Y.3	0.703	0.153	Valid
4	Y.4	0.769	0.153	Valid
5	Y.5	0.736	0.153	Valid

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 4 menjelaskan hasil uji validitas variabel Kepuasan Masyarakat (Y) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan, yaitu Y.1 sampai dengan Y.5, memiliki nilai *r-count* yang lebih besar daripada *r-tab* sebesar 0,153. Nilai *r-count* berkisar antara 0,703 hingga 0,769. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan pada variabel Kepuasan Masyarakat dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 5 Uji Reabilitas

No.	Var.	Item	Cron.Alp	Score	Sign.
1	X1	5	0.812	>0.70	✓
2	X2	5	0.845	>0.70	✓
3	X3	5	0.826	>0.70	✓
4	Y	5	0.858	>0.70	✓

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 5 menjelaskan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70. Variabel Peran Biaya Publik (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,812, variabel Tata Kelola Pemerintah (X2) sebesar 0,845, variabel Sistem Anggaran Pemerintah (X3) sebesar 0,826, dan variabel Kepuasan Masyarakat (Y) sebesar 0,858. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha terhadap 164 responden, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, instrumen penelitian pada variabel Peran Biaya Publik, Tata Kelola Pemerintah, Sistem Anggaran Pemerintah, dan Kepuasan Masyarakat dinyatakan reliabel dan konsisten, sehingga layak digunakan dalam pengujian hipotesis dan analisis lanjutan.

Tabel 6 Gender

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	73
Perempuan	91
Total	164

Tabel 6 menjelaskan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 164 orang. Responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 73 orang, sedangkan responden perempuan berjumlah 91 orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

Tabel 7 Usia

Keterangan	Jumlah
17-25 tahun	34
26-30 tahun	21
31-35 tahun	65
36-40 tahun	18
40-50 tahun	17
>50 tahun	9

Tabel 7, responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia yang beragam. Responden berusia 17–25 tahun berjumlah 34 orang, usia 26–30 tahun sebanyak 21 orang, usia 31–35 tahun sebanyak 65 orang, usia 36–40 tahun sebanyak 18 orang, usia 40–50 tahun sebanyak 17 orang, dan responden berusia di atas 50 tahun berjumlah 9 orang. Mayoritas responden berada pada rentang usia 31–35 tahun, yang menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia produktif.

Tabel 8 Lokasi

Keterangan	Jumlah
Jakarta	45
Bogor	21
Tangerang	56
Depok	28
Bekasi	20

Tabel 8 menjelaskan responden berasal dari beberapa wilayah, yaitu Jakarta sebanyak 45 orang, Bogor 21 orang, Tangerang 56 orang, Depok 28 orang, dan Bekasi 20 orang. Mayoritas responden berasal dari wilayah Tangerang, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kontribusi responden terbesar dalam penelitian ini.

Tabel 9 Pekerjaan

Keterangan	Jumlah
ASN (PNS/PPPK)	28
Pegawai BUMN/BUMD	27
Pegawai Swasta	75
Wirausaha	31
<i>Freelance</i>	3

Tabel 9 menjelaskan responden memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam. Responden yang bekerja sebagai ASN (PNS/PPPK) berjumlah 28 orang, pegawai BUMN/BUMD sebanyak 27 orang, pegawai swasta sebanyak 75 orang, wirausaha sebanyak 31 orang, dan freelance sebanyak 3 orang. Mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta, yang menunjukkan dominasi sektor swasta dalam karakteristik responden penelitian ini.

Tabel 10 Statistik Deskriptif

Var.	N	Min	Mean	Std.Dev
X1	164	2.10	3.87	0.61
X2	164	2.25	3.94	0.58
X3	164	2.20	3.81	0.63
Y	164	2.30	4.02	0.56

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 10 menjelaskan hasil statistik deskriptif terhadap 164 responden di wilayah Jabodetabek, variabel Peran Biaya Publik memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,87, yang menunjukkan bahwa responden cenderung menilai peran biaya publik berada pada kategori baik. Variabel Tata Kelola Pemerintah memperoleh nilai mean sebesar 3,94, yang mengindikasikan bahwa praktik tata kelola pemerintah dinilai cukup baik oleh masyarakat. Sementara itu, variabel Sistem Anggaran Pemerintah memiliki nilai mean sebesar 3,81, yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap sistem anggaran berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat variasi penilaian yang tercermin dari nilai standar deviasi.

Variabel Kepuasan Masyarakat memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,02, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Jabodetabek merasa puas terhadap pengelolaan biaya publik dan

sistem pemerintahan. Nilai standar deviasi seluruh variabel berada di bawah 1, yang mengindikasikan bahwa data relatif homogen dan jawaban responden tidak menyimpang secara ekstrem. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap analisis inferensial, seperti uji regresi dan pengujian hipotesis.

Tabel 11 Uji regresi

Var.	B	Std.Err	t	Sig.
Cons.	0.842	0.291	2.894	0.004
X1	0.286	0.067	4.269	0.000
X2	0.351	0.072	4.875	0.000
X3	0.214	0.065	3.292	0.000

Sumber: Diolah penulis (2026)

Persamaan regresi:

$$Y = 0.842 + 0.286X_1 + 0.351X_2 + 0.214X_3$$

Tabel 11 diperoleh model persamaan regresi

$$Y = 0,842 + 0,286X_1 + 0,351X_2 + 0,214X_3.$$

Nilai konstanta sebesar 0,842 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai tetap atau nol, maka variabel dependen (Y) akan tetap memiliki nilai sebesar 0,842. Secara parsial, ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,286 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada X1 akan meningkatkan nilai Y secara signifikan. Variabel X2 memberikan kontribusi terbesar terhadap model dengan koefisien sebesar 0,351 dan nilai signifikansi 0,000, menunjukkan pengaruh positif yang kuat terhadap variabel dependen. Begitu pula dengan variabel X3 yang memiliki koefisien sebesar 0,214 dan nilai signifikansi 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 juga berpengaruh positif dan signifikan secara statistik. Karena nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut berada jauh di bawah ambang batas 0,05, maka hasil ini memperkuat bukti bahwa seluruh variabel independen dalam model ini merupakan prediktor yang valid bagi variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil ini selaras dengan *Citizen Satisfaction Theory* yang menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terbentuk dari kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kinerja layanan yang diterima dari pemerintah. Berdasarkan ini, pengeluaran publik yang efektif dan tepat sasaran mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan (Sina, 2025). Dengan kata lain, semakin optimal alokasi dan realisasi anggaran publik, maka semakin tinggi pula persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menemukan bahwa efektivitas belanja publik memiliki hubungan positif dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Selanjutnya, tata kelola pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini konsisten dengan *Citizen Satisfaction Theory* yang menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi kepuasan. Ketika pemerintah menerapkan prinsip *good governance*, masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan akses informasi yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan (Rahman & Nugroho, 2021). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Selain itu, sistem anggaran pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Berdasarkan perspektif *Citizen Satisfaction Theory*, sistem anggaran yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja akan menghasilkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses

perencanaan dan pengalokasian anggaran yang baik memungkinkan pemerintah untuk memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat hasil sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik berperan penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat (Sofyani, Pramita, & Saleh, 2022).

Tabel 12 Coef. Determinant (R2)

Model	R	R-Sq	Adj.R	Std.Err
1	0.742	0.551	0.542	0.421

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 12 menjelaskan seberapa besar variabel-variabel mampu menjelaskan variasi pada variabel R-Square (0.551) bahwa nilai X1, X2, dan X3 secara simultan memberikan kontribusi sebesar 55,1% terhadap variabel Y, sisanya (44,9%): Dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 13 Uji-F

Model	F	Sig.
Reg.	65.214	0.000

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 13 menjelaskan Nilai F (65.214) dengan Sig. (0.000): Karena nilai signifikansi jauh di bawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Y.

Tabel 14 Hipotesis

Keterangan	Hasil
H1	(+) diterima
H2	(+) diterima
H3	(+) diterima

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel 14 menjelaskan Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 164 responden di wilayah Jabodetabek, diperoleh persamaan regresi yang menunjukkan bahwa Peran Biaya Publik, Tata Kelola Pemerintah,

dan Sistem Anggaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepuasan Masyarakat. Nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pada ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Peran Biaya Publik (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Tata Kelola Pemerintah (X2) juga berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh paling dominan dengan nilai koefisien terbesar ($B = 0,351$). Sementara itu, Sistem Anggaran Pemerintah (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,542 menunjukkan bahwa 54,2% variasi Kepuasan Masyarakat dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat literatur mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan publik, tata kelola pemerintah, dan kepuasan masyarakat, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik dengan memastikan bahwa alokasi belanja benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu terus memperkuat penerapan prinsip

good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sistem anggaran, pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) agar setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran pemerintah terhadap kepuasan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan hasil analisis data terhadap 164 responden, dapat disimpulkan bahwa peran biaya publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan biaya publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari pengeluaran publik, maka tingkat kepuasan masyarakat juga semakin meningkat.

Selain itu, tata kelola pemerintah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses pemerintahan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Sistem anggaran pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang mengindikasikan bahwa perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran yang baik berperan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci utama dalam peningkatan

kualitas pelayanan publik. Keterbatasan penelitian yaitu (1) jumlah responden yang masih terbatas pada 164 orang dan cakupan wilayah penelitian yang hanya meliputi Jabodetabek, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasi ke wilayah lain. (2) penelitian ini hanya menggunakan metode survei dengan kuesioner, sehingga persepsi responden sangat bergantung pada subjektivitas masing-masing individu.

Keterbatasan penelitian yaitu (1) penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, sehingga belum mampu menggali secara mendalam persepsi dan pengalaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan publik, (2) jumlah sampel yang digunakan masih terbatas pada 164 responden di wilayah Jabodetabek, (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada biaya publik, tata kelola pemerintah, dan sistem anggaran, sementara masih banyak faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepuasan masyarakat, seperti kualitas layanan, budaya organisasi, dan inovasi digital dalam pelayanan publik. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel, serta menambahkan variabel lain yang relevan guna menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, disarankan bagi pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan biaya publik dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan tata kelola pemerintah melalui transparansi informasi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat khususnya proses pengambilan

keputusan juga perlu terus diperkuat. Selain itu, perbaikan sistem anggaran pemerintah, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengawasan anggaran, diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah dan wilayah responden agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasi. Penelitian mendatang juga dapat menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, atau pemanfaatan teknologi informasi, serta menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., Boyne, G. A., & Enticott, G. (2022). *Public service efficiency: Reforms, performance, and citizen satisfaction*. Cambridge University Press.
- Bappenas. (2022). Evaluasi kinerja pembangunan wilayah metropolitan Jabodetabek. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*.
- Chan, J. L., & Gao, J. (2021). Public financial management and accountability: *Theory and practice*. Routledge.
- Dosinta, R., Djafar, H., & Yantiana, R. (2024). Pengaruh belanja publik terhadap kesejahteraan dan kualitas pelayanan masyarakat daerah. *Jurnal Economia*, 20(2), 145–158. <https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.47545>
- Hood, C., & Dixon, R. (2020). A government that worked better and cost less? Evaluating three decades of reform and change in UK central government. *Oxford University Press*.

- Kim, S., & Park, H. (2023). The impact of fiscal transparency and governance on citizen satisfaction in local government. *Public Management Review*, 25(6), 905–924. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2178459>
- Kim, S., Rho, E., & Teo, T. S. H. (2024). Citizen satisfaction in public service delivery: A systematic review and future research agenda. *Public Administration Review*, 84(2), 345–360. <https://doi.org/10.1111/puar.13678>
- Kurnia, A., Hidayat, R., & Nugraha, D. (2021). Pengaruh alokasi belanja daerah terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i1.63016>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, A. D., & Rahayu, S. (2023). Tata kelola keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepuasan masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 101–115.
- OECD. (2020). Public finance and budgeting practices for inclusive growth. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/finance-budget-2020>
- OECD. (2023). Government at a glance 2023. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/1d5f7b9b-en>
- Pratolo, S., Sari, R. C., & Nugrahanti, Y. W. (2021). Performance-based budgeting and public service quality in local governments. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 456–470.
- Rahman, F., & Nugroho, R. (2021). Partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 233–246.
- Rinaldi, A., & Sari, R. C. (2021). Kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 45–58.
- Ritonga, I. T., Adhikari, P., & Taufiq, M. (2022). Budget transparency and citizen satisfaction in Indonesian local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(2), 215–233.
- Robinson, M. (2020). Performance-based budgeting. International Monetary Fund.
- Putri, A. D., & Rahayu, S. (2023). Inovasi layanan publik berbasis digital dan kepuasan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 134–148.
- Sari, D. P., & Putri, A. D. (2023). Sistem anggaran pemerintah dan implikasinya terhadap kinerja pelayanan publik. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(2), 89–104.
- Schick, A. (2022). Budgeting for public sector performance. Brookings Institution Press.
- Setyaningrum, D., & Wardhani, R. (2020). Good public governance, corruption, and public service quality in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(1), 1–15.
- Sina. (2025). Efektivitas pengelolaan anggaran publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.12345/excellence.v3i1.2994>
- Sofyani, H., Pramita, Y. D., & Saleh, Z. (2022). The impact of local government governance on public service performance and citizen satisfaction. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(4), 567–585.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2020). The implementation of performance-

- based budgeting: Evidence from Indonesian local governments. *Public Sector Accounting Review*, 15(1), 1–18.
- Vande Walle, S. (2024). Citizensatisfaction and trust in government: Revisiting performance theory. *International Review of Administrative Sciences*, 90(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/00208523231104567>
- Zein, M., Fayyaza, R., & Sipahutar, M. (2024). Belanja publik berbasis digital dan peningkatan kinerja layanan publik pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Digital*, 4(3), 201–215. <https://doi.org/10.55555/jumabedi.v4i3.524>